

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti peningkatan output. Peningkatan output akan meningkatkan pendapatan. Dalam jangka panjang akumulasi investasi mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kinerja investasi atau penanaman modal sering hanya diukur atau dilihat dari kegiatan pembangunan pabrik baru atau perusahaan besar seperti pabrik industri pengolahan, hotel, dan restoran. Padahal apabila dilihat dari definisi penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Definisi “segala bentuk kegiatan menanam modal” diartikan bahwa penanaman modal tidak hanya diartikan berdirinya perusahaan besar atau pabrik saja tetapi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah juga merupakan bentuk penanaman modal. Dengan demikian dampak dan keterkaitannya cukup besar, baik pada investor sendiri, pemerintah daerah, maupun rakyat kecil. Makin banyak dan tinggi nilai investasi, kian besar pula dampak dan manfaat yang dipetik, seperti menyerap tenaga kerja, optimalisasi sumber daya alam, serta yang paling utama meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di daerah tersebut

Urusan penanaman modal dilaksanakan dalam rangka memperhatikan tuntutan masyarakat akan perlunya pelayanan prima serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Melalui kebijakan daerah dibidang pelayanan perijinan terpadu yang memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan didukung kondisi keamanan yang kondusif, infrastruktur, dan promosi investasi maka akan berdampak pada meningkatnya investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Wonosobo dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya serap tenaga kerja.

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal pada tahun 2016 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh OPD Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan Setda.

a. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan urusan penanaman modal, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.528.370.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.367.527.856,-. Anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan promosi dan kerjasama investasi, peningkatan iklim investasi. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.C.12.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal Tahun 2016

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	1.335.507.500	1.303.247.337
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	300.000.000	287.440.128
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	200.000.000	198.627.200
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	260.450.000	253.069.940
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	350.057.500	341.782.569
5	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, sarana dan Prasarana Daerah	225.000.000	222.327.500
B	Belanja Tidak Langsung	2.192.862.500	2.064.280.519
1	Gaji dan Tunjangan	1.530.376.000	1.441.768.919
2	Tambahan Penghasilan PNS	604.200.000	574.297.250
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	58.286.500	48.214.350
	JUMLAH	3.528.370.000	3.367.527.856

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2016 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini bertujuan untuk membawa citra daerah sebagai daerah tujuan investasi yang menarik dengan sasaran meningkatnya jumlah minat investor untuk melakukan investasi. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan berupa:

- Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan LKPM dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan investasi di Kabupaten Wonosobo dengan sasaran 20 PMA/PMDN di Kabupaten Wonosobo dalam bentuk Monitoring dan peninjauan pelaksanaan penanaman modal.
- Penyusunan Profil Investasi dalam rangka menyediakan data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan penanaman modal di Kabupaten Wonosobo, kegiatan ini diwujudkan dalam penyusunan profil investasi, leaflet, booklet dan tas promosi
- Fasilitasi Promosi Investasi untuk meningkatkan kerjasama dan penanaman modal di Kabupaten Wonosobo serta penyampaian informasi potensi Investasi dilaksanakan dalam bentuk promosi dan kerjasama investasi didalam daerah (Jawa Tengah dan Luar daerah (Luar Jawa Tengah)
- Penyediaan Sarana Prasarana Promosi di Kabupaten Wonosobo

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung daerah dalam rangka mendorong investasi agar semakin meningkat didukung iklim investasi yang kondusif. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan berupa :

- Sosialisasi Perijinan dalam rangka Peningkatan jumlah pemohon perijinan dilaksanakan di Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Kejajar, Kec. Garung , Kecamatan Kertek dan Kecamatan Wadaslintang
- Pengkajian Perijinan di Kabupaten Wonosobo dalam rangka penerbitan ijin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan dilaksanakan sidang pengkajian Perijinan
- Monitoring dan Evaluasi untuk mengetahui kesesuaian antara ijin yang diajukan dengan usaha yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Penyusunan SOP BPMPT di Kabupaten Wonosobo
- Penyusunan Naskah Akademik Pemetaan Tata Ruang IUTM dalam rangka Peningkatan kecukupan regulasi dalam mendukung investasi daerah di Kabupaten Wonosobo .

3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kualitas administrasi perkantoran yang tertib dan lancar serta terlaksananya tugas kedinasan dengan cepat dan akurat yaitu melalui kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan, Penyelesaian Pekerjaan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yaitu dengan melalui kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor.

5) Program Penyiapan Potensi Sumber daya, sarana dan Prasarana Daerah

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yaitu dengan melalui kegiatan :

- Pengadaan dan Pemeliharaan Panggung Spanduk. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas promosi bagi masyarakat di Kabupaten Wonosobo dalam bentuk Penyediaan dan pemeliharaan panggung spanduk, space reklame.

IV.C.12. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal

- Pengadaan Sistem Aplikasi Manajemen Kegiatan ini berupa pengadaan sistem Manajemen untuk perijinan dan penanaman modal dan sosialisasi dan pelatihan aplikasi sistem penanaman modal dan perijinan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan perijinan dan penanaman modal di Kabupaten Wonosobo.

c. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Capaian kinerja urusan Penanaman Modal di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKK) sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel IV.C.12.2
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2015
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1	Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (Realisasi PMDN thn 2016 (Rp 758.209.545.009) – Realisasi PMDN 2015 (Rp 308.950.007.351 / (Realisasi PMDN 2015 (Rp 308.950.007.351) x 100%	40,14%	145,41%

Sumber: BPMPT,2016

Keterangan :

Nilai investasi didasarkan pada jumlah modal usaha yang dipantau melalui penerbitan Ijin Usaha. Belum semua masyarakat melaporkan pengurusan ijin, sehingga bagi usaha-usaha yang belum berijin tidak dapat dipantau nilai investasinya.

Tabel IV.C.12.3
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016
Berdasarkan Indikator RPJMD 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1	Persentase kenaikan Jumlah kerjasama investasi	10%	0
2	Persentase Kenaikan jumlah investor berskala nasional (PMDN)	0	0
3	Jumlah Nilai Investasi	1,09 triilyun	1,86 triilyun
4	Daya Serap Tenaga Kerja (Perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/ PMDN terhadap PMDN dan PMA	33	97,9
5	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui PTSP	66,67%	38,19%
6	Persentase implementasi SPIPISE	70%	100%
7	Rata –rata lama proses perijinan	7 hari	4 hari

IV.C.12. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal**

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		2015	2016
8	Persentase investasi ramah lingkungan	20%	-
9	Persentase potensi investasi yang sudah memiliki FS	0	16%

Sumber: BPMPT, 2016

Capaian kinerja urusan Penanaman Modal Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di mana pada tahun 2016 realisasi penanaman modal dilihat dari jumlah modal usaha berdasarkan penerbitan Ijin usaha sebesar 768,1 milyar rupiah, -. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 ada kenaikan sebesar 145,41% . Nilai investasi sampai dengan tahun 2016 ini sudah melampaui target RPJMD 2016-2021 sebesar 496,96 milyar Rupiah. Sampai dengan tahun 2016 penanaman modal di Kabupaten Wonosobo sudah mencapai 1,86 trilyun rupiah, mengalami kenaikan 69,9% . Pada tahun 2016 persentase implementasi perijinan yang melalui SPIPISE sudah 100%. Sedangkan rata- rata lama proses Perijinan adalah (empat) hari.

Berdasarkan sektor usaha, sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.B.9.4, investasi yang ada di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 terbanyak di sektor Listrik, Gas dan Air sebesar Rp 311.979.989.780,- diikuti sektor jasa lainnya. Sedangkan daya serap tenaga kerja pada penanaman modal ini sektor industri kayu menyerap tenaga kerja yang paling banyak yaitu 1.676 orang.

Tabel IV. C.12.4
Rekapitulasi Penanaman Modal per Sektor/Sub sektor Tahun 2016

No.	Sektor/Sub Sektor	Nilai investasi (Rp.)	Tenaga Kerja
1.	Tanaman pangan dan perkebunan	49.837.970.801	-
2.	Peternakan	2.165.000.000	-
3.	Kehutanan	-	-
4.	Perikanan	-	-
5.	Pertambangan	-	-
6.	Industri makanan	3.691.447.000	225
7.	Industri Tekstil	-	-
8.	Industri Barang dari Kulit dan alas kaki	-	-
9.	Industri Kayu	79.463.825.000	1.676
10.	Industri Kertas dan percetakan	403.220.000	5
11.	Industri Kimia dan farmasi	-	-
12.	Industri Karet dan plastik	-	-
13.	Industri Mineral non logam	242.500.000	29
14.	Industri Logam, Mesin dan elektronik	175.000.000	16
15.	Industri Instrumen kedokteran, presisi & optik & jam	-	-
16.	Industri Kendaraan bermotor & alat transportasi lain	322.896.000	15
17.	Industri lainnya	380.500.000	21
18.	Listrik, gas dan air	311.979.989.780	57
19.	Konstruksi	92.359.493.612	-
20.	Perdagangan dan reparasi	69.066.357.345	-

IV.C.12. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal**

No.	Sektor/Sub Sektor	Nilai investasi (Rp.)	Tenaga Kerja
21.	Hotel & restoran	39.215.050.000	7
22.	Transportasi, gedung & komunikasi	4.900.000.000	-
23.	Perumahan, kawasan industry & perkantoran	14.775.000.000	104
24.	Jasa Lainnya	98.970.683.471	195
Jumlah		767.948.933.009	2.350

Sumber : BPMPPT, 2016

d. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan urusan penanaman modal dan upaya yang dilakukan antara lain :

Tabel C.12.5
Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Penanaman Modal

No.	Permasalahan	Solusi
1	Belum adanya informasi kebutuhan investasi di Kabupaten Wonosobo	Mengkaji kebutuhan investasi daerah dan penyusuna profil investasi daerah
2	Keterbatasan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program termasuk aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki masih belum memadai dala memperlancar pelayanan publik	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja, termasuk di dalamnya pengembangan dan penyempurnaan aplikasi sistem informasi dan komunikasi
3	Kondisi wilayah Wonosobo yang kurang strategis serta dukungan infrastruktur yang kurang memadai	Peningkatan dan perbaikan infrastruktur
4	Keseriusan calon investor yang masih kurang baik, setelah sebelumnya menyatakan kepeminatan.	Mencermati setiap investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Wonosobo.